

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Teori Dasar Penelitian

*Agency Theory* atau yang biasa disebut teori agensi menjelaskan tentang hubungan antara dua pihak yaitu pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*). Menurut Supriyono (2020:63) keperilakuan teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemberi kontrak) dan agen (penerima kontrak), prinsipal kontrak agen bekerja demi tujuan yang dimiliki sehingga agen diberi kewenangan dalam pembuatan keputusan.

Menurut Eisenhard yang dikutip oleh Ningsih, *et al.* (2019:151) teori keagenan dilandasi oleh 3 asumsi, yakni:

1. Asumsi tentang sifat manusia, yang menekankan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan tidak menyukai risiko (*risk aversion*).
2. Asumsi tentang keorganisasian, yaitu adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya *asymmetric information* (AI) antara principal dan agen.
3. Asumsi tentang informasi, yaitu bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjual belikan.

Hubungan keagenan akan memicu timbulnya masalah keagenan. Masalah keagenan ini timbul dengan tujuan alih-alih membuat keputusan bisnis yang mengoptimalkan kesejahteraan prinsipal dengan meningkatkan nilai perusahaan,

terkadang agen membuat pilihan yang menguntungkan kesejahteraan finansial agen itu sendiri.

Konflik keagenan yang timbul antara berbagai pihak yang memiliki banyak kepentingan dapat mempersulit dan menghambat perusahaan dalam mencapai kinerja yang positif untuk menghasilkan nilai yang berguna bagi perusahaan itu sendiri. Selain itu, adanya ketidakseimbangan penguasaan informasi dapat memicu munculnya suatu kondisi yang disebut dengan asimetri informasi (*information asymmetry*). Adanya asimetris informasi antara agen dan prinsipal dapat mengakibatkan dua hal, yaitu:

1. *Adverse Selection*, Prinsipal tidak mengetahui secara pasti terkait keputusan yang dibuat oleh manajemen telah sesuai atau tidak.
2. *Moral Hazard*, akibat adanya asimetris informasi, agen dapat melakukan kegiatan di luar pengerahuan prinsipal (pemegang saham dan investor) yang melanggar etika dan kontrak.

Menurut PSAK No. 1 laporan keuangan merupakan perincian metodis dari status dan hasil keuangan perusahaan. Laporan tersebut memberikan penilaian moneter dari kegiatan masa lalu organisasi. Sedangkan menurut Kasmir (2019:7) laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Adapun menurut Prihadi (2020:8) laporan keuangan adalah hasil dari kegiatan pencatatan seluruh transaksi keuangan di perusahaan.

Berdasarkan pengertian laporan keuangan menurut PSAK dan para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan penyajian terstruktur dari

posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas serta hasil akhir dari kegiatan akuntansi yang memperlihatkan kondisi keuangan dalam jangka waktu tertentu.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam PSAK No.1 menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Sehingga dapat diketahui bahwa laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai setiap akun di laporan keuangan untuk memberikan keputusan yang dalam jangka pendek dan jangka panjang. Adapun karakteristik laporan keuangan menurut PSAK No.1 adalah sebagai berikut:

- a. Dapat dipahami artinya informasi akuntansi harus dapat dipahami oleh pemakai dan dinyatakan dalam bentuk istilah sesuai dengan pemakai.
- b. Relevan artinya informasi harus bermanfaat dan dikaitkan dengan tindakan. Dapat dikatakan relevan apabila dapat merubah keputusan.
- c. Keandalan artinya informasi pada laporan keuangan bebas dari kesalahan material dan bias, serta disajikan secara jujur.
- d. Dapat dibandingkan artinya informasi pada laporan keuangan dapat bermanfaat apabila diperbandingkan dengan laporan keuangan entitas sejenis untuk periode yang sama.

## 2.2 Variabel Y dan X

Pada penelitian ini, variabel yang berperan sebagai variabel *dependent* (Y) ialah integritas laporan keuangan. Variabel *dependent* merupakan variabel yang

dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel *independent*. Adapun variabel *independent* (X) dalam penelitian ini berjumlah 4 yaitu ukuran perusahaan (X1), kepemilikan manajerial (X2), kepemilikan institusional (X3) dan komite audit (X4)

### 2.2.1 Integritas Laporan Keuangan

Laporan keuangan memiliki integritas jika menunjukkan keadaan perusahaan yang sebenarnya tanpa hiasan atau kelalaian. Ada kemungkinan penuntutan yang lebih tinggi bagi seorang auditor jika dia meninjau laporan keuangan yang tidak memiliki integritas (tidak secara akurat mencerminkan kesehatan keuangan organisasi). Karena ternyata laporan keuangan yang dilembungkan akan cukup merugikan pengguna laporan keuangan tersebut jika laporan keuangan tersebut tidak berintegritas.

Laporan keuangan sebagai media yang menyediakan informasi bagi pemangku kepentingan baik pihak internal maupun eksternal harus menjunjung tinggi integritas dalam penyajiannya. Dalam *statement of financial accounting concept* (SFAC) laporan keuangan yang berintegritas memenuhi kualitas *reliability* (keandalan) yang terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- a. *Verifiability* (dapat diverifikasi) informasi akuntansi harus dapat diuji kebenarannya berdasarkan pada objektifan dan consensus.
- b. *Representational faithfulness* (penyajian jujur) informasi akuntansi harus jujur berarti adanya kesesuaian antara fakta dan informasi yang disampaikan.

- c. *Neutrality* (netral) informasi akuntansi dimaksudkan untuk memenuhi tujuan berbagai kelompok pemakai. Tidak hanya untuk memenuhi keuntungan kepada kelompok tertentu. Informasi yang disajikan harus factual, benar dan tidak bias.

Integritas laporan keuangan dapat di proksikan dengan indeks konservatisme. Indeks konservatisme sebagai proksi integritas laporan keuangan dihitung dengan menggunakan Model Beaver dan Ryan (*Market to Book Ratio*), yaitu:

$$\text{ILK} = \frac{\text{Harga Pasar Saham}}{\text{Nilai Buku Saham}} \quad \text{Rumus 2.1 Integritas Laporan Keuangan}$$

Keterangan :

ILK = Integritas Laporan Keuangan Perusahaan

Harga Pasar Saham = Harga saham pada 31 Desember periode 2018-2022

Nilai Buku Saham = Total ekuitas dibagi jumlah saham beredar

### 2.2.2 Ukuran Perusahaan

Widiastari & Wirawan (2018:958) mengemukakan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan diukur dengan total aktiva, jumlah penjualan, nilai saham dan sebagainya. Selain itu ukuran perusahaan dilihat dari bidang bisnis yang sedang dioperasikan, ukuran perusahaan dapat ditentukan berdasarkan total penjualan, total aset, tingkat penjualan rata-rata (Novianti & Agustian, 2018:255).

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan dapat dilihat dari banyaknya jumlah aset yang dimiliki perusahaan. Kejujuran manajemen dalam menyusun laporan keuangan dipengaruhi oleh ukuran

perusahaan. Seseorang dapat membandingkan ukuran perusahaan dengan melihat kapitalisasi pasar, penjualan, atau total asetnya (Septiana & Dahlia, 2021:136).

Usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar merupakan empat kategori ukuran perusahaan yang ditetapkan oleh UU No. 20 Tahun 2008. Menurut Pasal 1 (satu) UU No. 20 Tahun 2008, berikut pengertian usaha mikro, kecil, menengah, dan besar:

- a. Usaha mikro merupakan usaha yang menguntungkan yang dijalankan oleh satu orang atau lebih dan memenuhi definisi "usaha mikro" dalam undang-undang ini.
- b. Usaha kecil merupakan kegiatan ekonomi mandiri yang dilakukan oleh orang atau organisasi yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikelola, atau menjadi bagian dari usaha menengah atau organisasi besar yang memenuhi persyaratan usaha kecil sebagaimana disinggung dalam pasal ini.
- c. Usaha menengah merupakan usaha ekonomi mandiri yang dijalankan oleh individu atau badan hukum yang tidak dimiliki, dikendalikan, atau berafiliasi dengan usaha kecil atau perusahaan besar dengan jumlah kekayaan bersih atau pendapatan dari penjualan setiap tahun sebagaimana ditentukan oleh undang-undang ini.
- d. Usaha besar merupakan terdiri dari badan usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan badan usaha internasional yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan memiliki kekayaan bersih atau angka penjualan tahunan di atas usaha menengah.

Keandalan laporan keuangan perusahaan dipengaruhi oleh ukurannya. Secara umum, biaya overhead perusahaan akan meningkat sebanding dengan ukurannya. Perusahaan dalam skala besar akan transparan dalam pelaporannya, mencerminkan laporan keuangan berintegritas tinggi yang membuat perusahaan dan eksekutifnya akuntabel. Untuk mengukur ukuran perusahaan ditunjukkan oleh total asset, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan dan rata-rata total asset (Rodoni & Ali, 2014:193).

$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{LogN} \times \text{Total Aset}$	<b>Rumus 2.2</b> Ukuran Perusahaan
---	------------------------------------

### 2.2.3 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh pihak internal atau manajemen yang sekaligus sebagai pengelola perusahaan tersebut. Kepemilikan manajerial mengacu pada kepemilikan saham di perusahaan oleh manajer yang berperan dalam pengambilan keputusan dalam organisasi, seperti komisaris dan direktur.

Agatha & Nurlaela (2020:1814) turut menyatakan bahwa kepemilikan manajerial merupakan pemilik saham perusahaan yang berasal dari manajemen yang ikut serta dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan yang bersangkutan. Manajemen memegang peranan sebagai pemilik sekaligus pengelola perusahaan, sehingga dalam menjalankan tugasnya cenderung akan melakukan upaya yang terbaik.

Kepemilikan manajerial akan menyeimbangkan informasi antara pemegang saham dan manajemen, sehingga akan mampu mengurangi masalah yang ditimbulkan dalam *agency theory*. Menurut Nurwani & Christina (2018:117)

kepemilikan yang dimiliki oleh manajerial sebagai pihak manajemen perusahaan bisa merasakan langsung dampak dari kebijakan yang sudah diambil.

Kepemilikan manajerial memberikan kesempatan manajer memiliki keterlibatan pada kepemilikan saham maka dengan keterlibatan ini kedudukan manajer sejajar dengan pemegang saham. Manajer diperlukan bukan semata sebagai pihak eksternal yang digaji untuk kepentingan perusahaan tetapi diperlukan sebagai pemegang saham. Sehingga diharapkan adanya keterlibatan manajer pada kepemilikan saham dapat efektif untuk meningkatkan kinerja manajer.

Memiliki manajer mengambil saham keuangan dalam organisasi dapat membantu mengendalikan praktik manajemen yang buruk. Salah satu metode untuk meningkatkan kepercayaan dalam pelaporan keuangan adalah agar manajer mengambil lebih banyak tanggung jawab pribadi atas jumlah mereka. Jadi, manajer dalam organisasi dengan persentase kepemilikan manajerial yang tinggi lebih cenderung bertanggung jawab atas operasi perusahaan, membuat keputusan yang tepat untuk kesuksesan jangka panjangnya, dan menyajikan hasil keuangan yang akurat dan dapat dipercaya.

Indikator yang digunakan untuk menguku kepemilikan manajerial adalah presentase saham yang dimiliki oleh manajemen meliputi direksi dan komisaris perusahaan.

$$\text{MAN} = \frac{\text{Jumlah Saham yang Dimiliki Manajemen}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}} \quad \text{Rumus 2.3 Kepemilikan Manajerial}$$

#### 2.2.4 Kepemilikan Institusional

Tamrin & Maddatuang (2019:72) mendefinisikan kepemilikan institusional sebagai persentase saham yang dimiliki oleh institusi seperti perusahaan investasi.



bank, perusahaan asuransi, maupun perusahaan lain. Sedangkan Akram., *et al.* (2020:15) menyatakan kepemilikan institusional sebagai proporsi saham yang beredar yang dimiliki oleh pihak eksternal atau biasa disebut dengan institusi lain diluar dari perusahaan misalkan seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun dan lain-lain.

Didukung dengan teori oleh Atianingsih & Suparwati (2018:112) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional efektif untuk mengurangi perselisihan agen manajer-pemegang saham. Manajer percaya investor institusional mampu melayani sebagai metode yang dapat diandalkan untuk mengamati dan mempengaruhi pengambilan keputusan.

Oleh karena itu sistem pemantauan yang efisien memberi lembaga kekuatan untuk mengatur manajemen. Dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi maka akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik yang dilakukan oleh pihak manajer serta dapat meminimalisir tingkat penyelewengan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang akan menurunkan nilai perusahaan.

Kepemilikan institusional dalam penelitian ini menggunakan pengukuran yang digunakan oleh Machdar dan Nurdiniah (2017:177) diukur dengan membandingkan jumlah saham yang dimiliki oleh institusi lain dengan jumlah saham perusahaan yang beredar.

$$KINST = \frac{\text{Jumlah Saham Institusi Lain}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}}$$

**Rumus 2.4** Kepemilikan Institusional

### **2.2.5 Komite Audit**

Komite audit adalah badan komisaris yang ditunjuk yang bertanggung jawab untuk memantau semua aspek pelaporan dan pengungkapan keuangan (Badewin, 2019:5). Sedangkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 menerangkan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan semua perusahaan atau emiten publik untuk membentuk komite audit dengan beranggotakan paling sedikit tiga (3) orang yang berasal dari komisaris independen dan pihak diluar perusahaan.

Laporan keuangan, audit eksternal dan sistem pengendalian internal semuanya berada di bawah lingkup komite audit. Perusahaan dengan komite audit telah ditunjukkan dalam berbagai penelitian memiliki risiko manajemen laba yang lebih rendah daripada yang tidak memilikinya. Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) menetapkan pembentukan komite audit untuk bisnis yang diperdagangkan secara publik sebagai bagian dari upaya untuk mendorong pengelolaan perusahaan yang bertanggung jawab.

Keberadaan komite audit bermanfaat untuk menjamin transparansi, keterbukaan laporan keuangan, keadilan untuk semua stakeholder dan pengungkapan semua informasi yang dilakukan oleh manajemen meski ada konflik kepentingan. Komite audit juga merupakan pihak yang mempunyai tugas untuk membantu komisaris independen dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan dan peningkatan efektifitas internal dan eksternal audit.

Dengan demikian komite audit dapat menjadi salah satu upaya untuk mengurangi kecurangan pada laporan keuangan. Semakin independen komite audit, maka semakin bisa diandalkan dalam mencegah terjadinya kecurangan pada laporan keuangan, sehingga laporan keuangan memiliki tingkat integritas yang tinggi. Semakin banyak jumlah komite audit yang independen maka semakin tinggi integritas laporan keuangan. Menurut Yulinda (2016:427) rumus komite audit (kudit) yaitu :

KA= Jumlah Anggota Komite Audit	<b>Rumus 2.5</b> Komite Audit
---------------------------------	-------------------------------

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Putri, et al (2022:12) berjudul "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Integritas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020)*" menunjukkan hasil ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan *leverage* berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Sedangkan kepemilikan manajerial dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Martius & Wage (2023:173) berjudul "*Analisis Rasio Profitabilitas dan Likuiditas Terhadap Return Saham Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*" menunjukkan hasil secara parsial maupun simultan rasio profitabilitas dan rasio likuiditas berpengaruh positif terhadap return saham diperusahaan subsector realestate.

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2021:85) dengan judul "*Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Financial Distress, dan Audit Tenure Terhadap Integritas Laporan Keuangan*" menunjukkan hasil bahwa komisaris independent dan komite audit tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan, *financial distress* berpengaruh signifikan negatif terhadap integritas laporan keuangan, *audit tenure* berpengaruh signifikan positif terhadap integritas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Abbas (2021:17) dengan judul "*Integrity Of Financial Statements And The Factors*" menghasilkan dampak negatif dari komisaris independen, dampak positif dari komite audit, dampak negatif dari ukuran bisnis, dan tidak ada dampak dari *leverage* terhadap keandalan laporan keuangan.

Selanjutnya ialah pengamatan yang dilakukan oleh Wardhani & Samrotun (2020:475) berjudul "*Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Ukuran dan Leverage Terhadap Integritas Laporan Keuangan*" menunjukkan hasil variabel kepemilikan institusional berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan variabel kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Pengamatan lainnya dilakukan oleh Ramadhan & Iskandar (2021:849) dengan judul "*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Integritas Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur*" memiliki hasil secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan variabel komite audit, kualitas audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap integritas

laporan keuangan. Sedangkan variabel independensi auditor, komisaris independen, ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Selanjutnya ialah pengamatan yang dilakukan oleh Suciiani (2019:23) berjudul "*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Integritas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2014-2017)*" menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, *leverage* dan dewan komisaris berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Sedangkan kepemilikan manajerial dan komite audit berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan.

Saad & Abdillah (2019:15) melakukan penelitian berjudul "*Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Audit Tenure, dan Financial Distress Terhadap Integritas Laporan Keuangan*" dengan hasil bahwa ukuran perusahaan dan *financial distress* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan *leverage* dan *audit tenure* secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

Kemudian, Fajar & Nurbaiti (2020:28) melakukan penelitian berjudul "*Pengaruh Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Integritas Laporan Keuangan*" menunjukkan hasil bahwa seluruh variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap integritas laporan keuangan. Secara parsial kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen tidak

berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Sedangkan komite audit dan ukuran perusahaan berpengaruh secara positif terhadap integritas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Santoso & Andarsari (2022:6) berjudul *"Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan"* menunjukkan hasil bahwa kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan dan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

Selanjutnya ialah Azzah & Triani (2021:18) melakukan penelitian berjudul *"Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, dan Leverage Terhadap Integritas Laporan Keuangan"* menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komisaris independen berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Tamara & Kartika (2021:12) dengan judul *"Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Komite Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan"* menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan komite audit tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

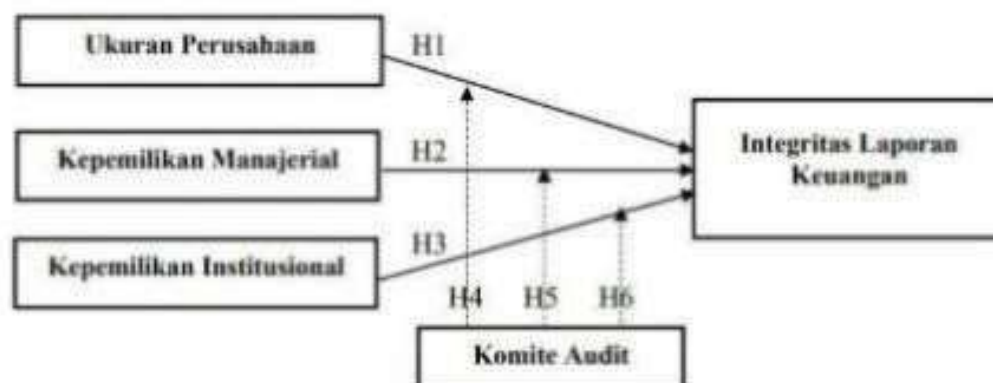
Kemudian, Badewin (2019:5) melalui penelitiannya yang berjudul *"Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di"*

*BET*. Menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan, komite audit dan kualitas audit berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Dan terakhir, pengamatan yang dilakukan oleh Rizkiyah (2020:10) berjudul *"Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komite Audit dan Leverage Terhadap Integritas Laporan Keuangan"* menunjukkan hasil kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit dan *leverage* mempengaruhi integritas laporan keuangan.

#### 2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang lebih diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, kerangka berfikir/pradigma penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

## 2.5 Hipotesis

Hipotesis adalah suatu pernyataan sementara yang diajukan untuk memecahkan suatu masalah, atau untuk menerangkan suatu gejala. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Maka hipotesis peneliti dikemukakan sebagai berikut:

- H<sub>1</sub>- Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan
- H<sub>2</sub>- Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
- H<sub>3</sub>- Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
- H<sub>4</sub>- Komite audit mampu memoderasi ukuran perusahaan terhadap integritas laporan keuangan
- H<sub>5</sub>- Komite audit mampu memoderasi kepemilikan manajerial terhadap integritas laporan keuangan
- H<sub>6</sub>- Komite audit mampu memoderasi kepemilikan institusional terhadap integritas laporan keuangan